BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan prinsip *good governance* menuntut pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik. Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui, mengakses, dan memahami informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi keuangan daerah memungkinkan publik mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, dilaksanakan, serta dipertanggungjawabkan, sehingga dapat mendorong pengawasan publik dan meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran (Eli Budi Santoso, 2024). Secara ideal, transparansi keuangan daerah diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika pemerintah secara terbuka menyampaikan informasi keuangan yang jelas, akurat, dan mudah diakses, masyarakat akan menilai bahwa pemerintah menjalankan tugasnya secara jujur dan bertanggung jawab. Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena kepercayaan yang tinggi akan mendorong partisipasi masyarakat, kepatuhan terhadap kebijakan publik, serta mendukung keberhasilan pembangunan daerah. tingkat transparansi keuangan daerah belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat hingga ke tingkat kecamatan. Di beberapa kecamatan, termasuk di wilayah perkotaan, informasi keuangan daerah sering kali hanya

tersedia secara formal melalui dokumen pemerintah, namun belum disosialisasikan secara efektif kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang memahami bagaimana anggaran daerah direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan, sehingga menimbulkan jarak informasi antara pemerintah dan masyarakat. transparansi keuangan daerah menjadi salah satu tuntutan utama masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat tidak hanya menuntut hasil pembangunan, tetapi juga menuntut keterbukaan informasi terkait perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Transparansi keuangan dipandang sebagai instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran, meningkatkan akuntabilitas publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Transparansi keuangan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi ini melibatkan penyajian informasi keuangan yang jujur, lengkap, dan dapat diakses oleh publik. Di banyak negara, 226 termasuk Indonesia, transparansi keuangan daerah menjadi perhatian utama karena terkait dengan upaya pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. akuntansi publik, transparansi keuangan daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan transparansi keuangan. Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,

yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan publik dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik(Zainab Masitha,2024). Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi salah satu indikator utama keberhasilan tata kelola pemerintahan, terutama dalam konteks desentralisasi di Indonesia. Kepercayaan ini memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana masyarakat bersedia mendukung dan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan publik.berpendapat bahwa kepercayaan sosial, termasuk kepercayaan terhadap pemerintah, merupakan modal sosial yang penting dalam meningkatkan efektivitas institusi pemerintahan. Pemerintah yang dipercaya oleh masyarakat cenderung lebih sukses dalam mengimplementasikan kebijakan publik karena mendapatkan dukungan dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan anggaran publik telah diidentifikasi sebagai salah satu solusi penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. menjelaskan bahwa transparansi anggaran bukan hanya tentang menyediakan informasi anggaran kepada publik, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses, dimengerti, dan akurat. Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran memungkinkan masyarakat untuk melakukan pemantauan yang lebih baik terhadap penggunaan dana publik, sehingga dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah (Moh Hamzah 2024).

Penerapan transparansi keuangan daerah belum sepenuhnya berjalan optimal, khususnya di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu kecamatan. Meskipun pemerintah daerah telah diwajibkan

untuk menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak semua informasi tersebut dapat diakses dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Informasi keuangan sering kali disajikan dalam bentuk laporan teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat awam atau hanya tersedia melalui media tertentu yang tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Berbagai kasus penyimpangan dan ketidakefisienan pengelolaan keuangan publik yang terjadi di Indonesia semakin memperkuat tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah. Minimnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran dan melemahkan fungsi pengawasan publik. Oleh karena itu, transparansi keuangan daerah tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. keterbatasan transparansi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena kepercayaan akan mendorong partisipasi publik, kepatuhan terhadap kebijakan, serta dukungan terhadap program pembangunan daerah. Ketika masyarakat merasa tidak memperoleh informasi keuangan yang jelas dan terbuka, maka persepsi negatif seperti dugaan penyalahgunaan anggaran, ketidakefisienan, dan rendahnya akuntabilitas cenderung muncul. akuntabilitas publik mengacu pada proses di mana

masyarakat diminta pertanggungjawaban atas cara pemerintah mengelola keuangannya dalam rangka meningkatkan layanan publik. Salah satu dari sekian banyak ciri pemerintah yang akuntabel adalah kemampuannya untuk melaporkan tindakannya secara cepat, benar, dan transparan. Kedua, mampu memberikan layanan yang berkualitas. Ketiga, dapat memberikan konteks dan pembenaran untuk berbagai kebijakan publik. Keempat, memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat umum untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Eliza Handayani Lubis 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan memiliki pengaruh positif terhadap persepsi masyarakat. Wibowo dan Susliyanti (2024) menemukan bahwa transparansi anggaran dan akuntabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat di tingkat kecamatan. Sementara itu, penelitian Sherly (2025) menunjukkan bahwa transparansi anggaran merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi akuntabilitas keuangan daerah. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada kepuasan masyarakat atau akuntabilitas keuangan daerah secara umum, serta dilakukan pada tingkat kabupaten atau provinsi. Penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh transparansi keuangan daerah terhadap kepercayaan masyarakat di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, masih relatif terbatas. Padahal, kecamatan merupakan unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memiliki peran penting dalam penyampaian informasi keuangan daerah. Perbedaan tingkat

pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi keuangan di Kecamatan Dau menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji secara empiris.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana transparansi keuangan daerah yang diterapkan di Kecamatan Dau serta bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur hubungan dan pengaruh transparansi keuangan daerah terhadap kepercayaan masyarakat secara objektif dan terukur. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu manajemen keuangan publik, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelititan dengan judul:

"Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kepercayaan Masyarakat di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang."

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah tingkat transparansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang?
2. Apakah akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang?

3. Apakah transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh positif dan signifikan transparansi keuangan daerah di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
2. Mengetahui pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas keuangan daerah terhadap kepercayaan masyarakat di Kecamatan Dau, Kabuppaten Malang
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi keuangan daerah dan akuntabilitas keuangan daerah terhadap Pemerintah Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

1.4 Paradigma Penelitian

Paradigma peneltian ini diartikan sebagai pola pikir yang menggambarkan korelasi atau hubungan antara variabel yang akan diteliti. Pada penelitian ini memakai paradigma positivisme yang memandang suatu realitas itu konkrit, terukur, bisa dimengerti, dapat diklasifikasikan serta memiliki hubungan sebab-akibat. Paradigma ini digunakan dalam penelitian kuantitatif dapat diklasifikasikan kedalam variabel, sehingga dapat dilakukan penelitian pada beberapa variabel saja. Dengan demikian metode kuantitatif didasarkan filsafat postivisme, diperlukan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data penelitian, menganalisis data secara statistik, dengan tujuan menguji hipotesis dan menggambarkan fenomena yang diteliti. Sehingga dengan pardigma positivisme terbentuk hubungan sebab-akibat, dan secara eksplisit dan implisit berkenan dengan pengaruh variabel independent terhadap dependen.

Penelitian kuantitatif juga bersifat bebas yang berarti tidak bersifat subjektif dan netral karena tidak berpengaruh oleh nilai-nilai yang diberikan oleh peneliti serta responden (Sugiyono,2020). Maka dalam penelitian ini yang berjudul pengaruh transparansi keuangan daerah terhadap kepercayaan masyarakat di kecamatan dau kabupaten malang.

Manfaat Penelitian Ini Adalah :

1. **Bagi Mahasiswa**

   Memberikan pemahaman mendalam tentang aplikasi teori akuntabilitas publik dalam konteks pemerintahan daerah, yang dapat diterapkan dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik atau Manajemen Keuangan Daerah. Melatih keterampilan penelitian empiris seperti analisis regresi dan SEM, serta pengumpulan data primer dari masyarakat, yang berguna untuk skripsi atau tugas akhir. Menyediakan referensi lokal (Kabupaten Malang) untuk studi kasus dalam diskusi kelas atau presentasi seminar.

2. **Bagi Universitas**

   Penelitian ini turut meningkatkan kontribusi universitas dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, sesuai dengan misi perguruan tinggi dalam pengabdian dan penelitian terapan**.** Penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang manajemen keuangan publik, akuntansi pemerintahan di lingkungan universitas. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar, referensi, maupun studi kasus untuk kegiatan akademik, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang terkait transparansi keuangan daerah terhadap kepercayaan masyarakat. Menyediakan rekomendasi praktis untuk meningkatkan transparansi APBD, seperti optimalisasi portal informasi keuangan, yang dapat mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Memberikan data empiris tentang faktor yang memengaruhi kepercayaan publik, sehingga membantu penyusunan kebijakan berbasis evidence untuk program musrenbang atau pengawasan anggaran.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dengan variabel atau lokasi penelitian yang berbeda.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup batasan-batasan yang digunakan agar penelitian dapat terarah, terfokus, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun ruang lingkup penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pengaruh tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Objek ini difokuskan pada hubungan antara keterbukaan informasi keuangan (misalnya APBD, laporan realisasi (anggaran) dengan persepsi dan sikap percaya masyarakat kepada pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Variabel PenelitianPenelitian ini melibatkan Tiga Variabel , Yaitu;

a. Variabel Independen (Bebas):

Transparansi Keuangan Daerah (X)

Akuntabilitas Keuangan Daerah (X)

b. Variabel Dependen (Terikat):

Kepercayaan Masyarakat (Y)